

## **PENGARUH PAD,DAU DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Mike Kusuma Dewi<sup>1</sup>, Lisha Ruraria Sabablat<sup>2</sup>, Elsa Meirina<sup>3</sup>, Desyani Umar<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

mikekusumadewi@akbpstie.ac.id, elsameirina@akbpstie.ac.id,

lisharurariasababalat01@gmail.com, desyani.umar@gmail.com

**Abstrak:** Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa ketergantungan besar pada bantuan pemerintah pusat maupun provinsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi potensi penerimaan daerah dan peningkatan efektivitas belanja modal untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci:** PAD, DAU, Belanja modal , Tingkat kemandirian keuangan.

***Abstract:** The level of regional financial independence is a measure of the extent to which a local government is able to finance its own government activities, development, and public services without relying heavily on central or provincial government assistance. The purpose of this study was to determine the effect of regional original revenue (PAD), general allocation funds (DAU), and capital expenditures on the level of regional financial independence in 19 regencies/cities in West Sumatra province from 2019 to 2022. The results indicate that PAD has a positive and significant effect on the level of regional financial independence. General allocation funds also have a positive and significant effect on the level of regional financial independence. Conversely, capital expenditure has a negative and significant effect on the level of regional financial independence. These findings emphasize the need to optimize regional revenue potential and increase the effectiveness of capital expenditures to strengthen regional financial independence.*

***Keywords** PAD, DAU, Capital Expenditure, Level of financial independence*

### **PENDAHULUAN**

Tingkat kemandirian keuangan Daerah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memilih pendekatan yang paling optimal dalam mengatur dan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat

setempat. Tata kelola daerah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan distribusi sumber daya secara efektif dan ekonomis. Meskipun telah dilaksanakan desentralisasi fiskal, otonomi daerah masih menjadi masalah yang terus ada. Salah satu masalahnya adalah daerah

bergantung pada pemerintah pusat untuk mengawasi keuangannya. Maka dari itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dana distribusi umum, belanja modal dan pendapatan awal daerah terhadap tingkat otonomi perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi otonomi perekonomian daerah dan memberikan rekomendasi bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan otonomi perekonomiannya. Bella, Sebagaimana Akhyar dkk. (2022) mencatat bahwa tujuan penerapan otonomi daerah terutama untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan proyek pembangunannya, sehingga ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikurangi. Namun, untuk memastikan tercapainya otonomi keuangan, pemerintah kota perlu memperoleh pendapatan utama yang memadai. Sumber utama pendapatan tersebut meliputi berbagai jenis, seperti pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang tidak termasuk dalam pendapatan administrasi, serta pendapatan sah lainnya dari daerah. Selain itu, pemerintah kota menerima kompensasi finansial dari negara. Sumatera Barat memiliki banyak sumber daya yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sumber daya yang dimaksud adalah pertambangan, pertanian dan perkebunan, kehutanan,

kelautan dan perikanan, serta jasa perindustrian. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap otonomi keuangan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1 Daftar daerah kategori kemandirian keuangan daerah tahun 2019-2022

No	Nama kab/kota	Tahun	Tkdd	Kategori
1	Kota Padang	2022	27%	Tinggi
2	Kab pesisir selatan	2022	9%	Sedang
3	Kab.kep.Mentawai	2021	4%	Rendah

Sumber data: <https://sumbar.bps.go.id/id>

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1, dapat dijelaskan bahwa terlihat adanya perbedaan tingkat kemandirian antara kota Padang, Kabupaten pesisir selatan, dan Kepulauan mentawai dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022. Kota Padang memiliki tingkat kemandirian tertinggi pada tahun 2022 dengan presentase 27% sedangkan kabupaten pesisir selatan hanya mencapai 9% ditahun yang sama. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat kemandirian terendah yaitu 4% pada tahun 2021. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan beberapa faktor utama. Kota padang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Barat memiliki infrastruktur yang lebih berkembang dari daerah lainnya, dengan adanya pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran dan sektor jasa yang berkembang pesat, kota padang dapat meningkatkan kemandirian ekonominya. Selain itu faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat

kemandirian kota Padang adalah adanya akses yang lebih baik terhadap investasi dan Sumber daya manusia yang lebih kompeten. Sebaliknya kabupaten Pesisir Selatan menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kemandirian. Kabupaten pesisir selatan dengan tingkat kemandirian 9% kemungkinan mengalami kendala dalam pembangunan infrastruktur dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Perekonomian daerah ini lebih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang rentan terhadap perubahan cuaca, bencana alam, dan fluktuasi harga pasar. Selain itu akses transportasi yang belum optimal bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten pesisir selatan. Sementara itu, kabupaten kepulauan mentawai memiliki tingkat kemandirian terendah dengan presentase 4% pada tahun 2021, dimana wilayah ini terdiri dari kepulauan yang aksesnya terbatas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan komunikasi masih belum berkembang secara maksimal, sehingga menyulitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selain itu sektor ekonomi di kabupaten kepulauan mentawai lebih banyak bergantung pada hasil alam, seperti perikanan dan pertanian subsisten, yang membuat daerah ini lebih sulit untuk mencapai kemandirian ekonomi yang tinggi. Dengan melihat perbedaan ini peningkatan kemandirian daerah dapat didorong melalui pembangunan infrastruktur pengembangan sektor ekonomi kreatif, peningkatan investasi serta peningkatan kapasitas daya manusia. Jika pemerintah daerah dan pusat dapat mengatasi kendala-kendala ini

maka dimasa depan daerah-daerah dengan tingkat kemandirian rendah dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atau regional secara mandiri dari berbagai sumber ekonomi di wilayahnya. PAD berfungsi sebagai sumber penting bagi pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk mendanai operasi pemerintah, menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bella, 2022). DAU diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum pembiayaan pemerintahan daerah. DAU dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari APBN secara tetap dan tidak dikaitkan dengan PAD atau sumber pendapatan lainnya. Tujuan DAU adalah untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata di antara daerah-daerah dengan peluang ekonomi yang berbeda. Pemerintah daerah menerima DAU dari pemerintah pusat. Berbagai faktor, seperti jumlah penduduk daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat ketergantungan fiskal, dan indikator keuangan lainnya, membentuk besarnya. Cara perhitungan dan pembagian DAU dapat berubah seiring waktu mengikuti Kebijakan yg ditetapkan oleh pemerintah. Berty S, (2023). Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian

keuangan daerah berkaitan dengan kapasitas suatu daerah untuk secara mandiri mengelola dan mengatur sumber daya keuangannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat, Tingkat otonomi keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatannya sendiri, menangani masalah keuangan secara efektif, dan juga memiliki kebebasan untuk mengalokasikan dana berdasar tingkat kebutuhan daerah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan objek penelitian yaitu kabupaten/kota provinsi sumatera barat, yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat. Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti secara eksplisit mencari data yang dapat diakses dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
PAD	5,93E-10	9,142796	0,0000
DAU	0,013452	2.144816	0,0365
BM	-5,50E-11	-2,613123	0,0116

*Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan views 10, 2025*

1.) Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan tabel 4,7 diketahui bahwa nilai t sebesar 9,142796 dan nilai koefisien regresi sebesar 5,93E-10 dengan nilai probabilitas 0,0000. Artinya pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai  $prob. < \alpha (0,05)$ , yaitu  $0,00 < 0,05$ .

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2022

2.) Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, diketahui bahwa nilai t sebesar 2.144816 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,013452 dengan nilai probabilitas 0,0365. Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai  $Prob. < \alpha (0,05)$  yaitu  $0,00 < 0,05$ . Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2022

3.) Hipotesis ketiga pengujian signifikansi secara persial antara variabel Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai  $t$  sebesar  $-5,50E-11$  dengan nilai prob.  $0,0000$ . Artinya Belanja Modal Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai  $\text{sig.} < \alpha (0,05)$ . Berdasarkan hasil uji  $t$  dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera barat tahun 2019-2022.

### UJI HIPOTESIS

#### a. Variable Pendapatan Asli Daerah (X1)

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, berdasarkan nilai  $t$  sebesar  $9,142796$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $5,93E-10$  dengan nilai probabilitas  $0,0000$ . Artinya pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai prob.  $< \alpha (0,05)$ , yaitu  $0,00 < 0,05$ .

#### b. Variabel Dana aloasi umum (X2)

Berdasarkan uji hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan

daerah, diketahui bahwa nilai  $t$  sebesar  $2.144816$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $0,013452$  dengan nilai probabilitas  $0,0365$ .

Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai Prob.  $< \alpha (0,05)$  yaitu  $0,00 < 0,05$ .

#### c. Variabel Belanja Modal (X3)

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, diketahui bahwa nilai  $t$  sebesar  $-5,50E-11$  dengan nilai prob.  $0,0000$ . Artinya Belanja Modal Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai  $\text{sig.} < \alpha (0,05)$ .

### PEMBAHASAN

1. **Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif** dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai prob.  $< \alpha (0,05)$ , yaitu  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, semakin besar PAD yang diperoleh oleh suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya dalam mengelola keuangan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, memungkinkan pemerintah daerah

untuk lebih fleksibel dalam membiayai pengeluaran daerah tanpa harus mengandalkan bantuan dari pusat.

## **2. dana alokasi umum berpengaruh positif**

dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, diketahui bahwa nilai  $t$  sebesar 2.144816 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,013452 dengan nilai probabilitas 0,0365. Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai  $\text{Prob.} < \alpha (0,05)$  yaitu  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi pada peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Artinya, semakin besar DAU yang diterima oleh suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangannya

## **3. Belanja modal berpengaruh negatif**

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, diketahui bahwa nilai  $t$  sebesar  $-5,50E-11$  dengan nilai prob. 0,0000. Artinya Belanja Modal Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai  $\text{sig.} < \alpha (0,05)$ . Berdasarkan hasil uji  $t$  dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal justru cenderung menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Dengan kata lain, meskipun belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan

investasi daerah, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) masih belum optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Hipotesis pertama diterima, yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar PAD yang diterima suatu daerah maka akan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengolah keuangan daerahnya
2. Hipotesis kedua diterima, yaitu variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menjelaskan apabila kemampuan keuangan daerah tidak mampu untuk membiayai belanja modal, maka pemerintah daerah akan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, akibatnya kemandirian keuangan daerah tidak bisa dicapai.
3. Hipotesis ketiga diterima, yaitu variabel terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, diketahui bahwa nilai  $t$  sebesar  $-5,50E-11$  dengan nilai prob. 0,0000. Artinya Belanja Modal Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena nilai  $\text{sig.} < \alpha (0,05)$ . Berdasarkan hasil uji  $t$  dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal justru cenderung menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Dengan kata lain, meskipun belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi daerah, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) masih belum optimal. Belanja modal yang dilakukan lebih banyak bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dibandingkan dari pendapatan daerah sendiri, sehingga semakin meningkatnya belanja modal justru memperbesar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menurunkan kemandirian keuangan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Fauziah N, A., & Haryanto. (2019). Analisis Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1–13.
- Ardiansyah, R.(2023).Jurnal Manajemen DanProfesional,4(1),92–106.  
<https://doi.org/10.32815/jpro.v4i1.1707>
- Barat, P. S. (2024). Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera barat. 4, 739–747.
- Bella, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Syntax Transformation, 3(05), 675–683.  
<https://doi.org/10.46799/jst.v3i5.562>
- Berty S, A. (2023). Berty. Mapping the Posthuman, 3(1),56–60.
- Fitriyani, E. N., & Suwarno, A. E. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SeNAPaN)*, 1(1), 61–69.  
<https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.228>
- Ivana, D., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2021): Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 4(2).
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337.Tim Unesa. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*. Surabaya: Unesa Press.
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014–2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 9226–9234.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7800>
- Mahardika, E. P., & Fauzan, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2019). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EQIEN)*, 11(1), 407–416.  
<https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.746>
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6831–6842.
- Sarumaha, M., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111.
- Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. (2024). Dampak Dana Transfer dan Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 247–261.  
<https://doi.org/10.29303/jaa.v9i1.487>
- F. (2022). *Jurnal Visioner & Strategis*, 11(1), 81–91.